



Bahrullah Akbar dan Achmad Djazuli

BPK RI, Indonesia.

Email: bahrullah.akbar@bpk.go.id, achmaddjazuli@yahoo.com



**FINANCIAL AUDIT AND  
PEOPLE'S WELFARE  
STUDY IN BADUNG, TABANAN  
REGIONS AND CITY OF  
DENPASAR YEAR OF 2013**

**AUDIT KEUANGAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
STUDI PADA KABUPATEN  
BADUNG, TABANAN DAN  
KOTA DENPASAR TAHUN 2013**

**ABSTRACT/ABSTRAK**

*Based on Article 23 UUD 1945, state finance management is addressed for the prosperity of people. Economic and non-economic welfare are two elements that form the prosperity of the people. This study aimed to see the relationship between financial audit and the welfare of the people in the Regencies of Badung, Tabanan and the City of Denpasar. This study use descriptive methodology to describe the relationship between the financial audit with the people's welfare through comparative techniques and scatter plots. The study result shows that economic welfare indicators in Bali are generally better than the national average. In addition, this study proved empirically that there is no strong relationship between financial audit particularly with people's welfare.*

**KEYWORDS:**

*people's prosperity, people's welfare, financial audit, descriptive methodology*

Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan *scatter plot* digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat

**KATA KUNCI:**

kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, audit keuangan, metodologi deskriptif

**SEJARAH ARTIKEL:**

**Diterima pertama:** Desember 2014

**Dinyatakan dapat dimuat :** Juni 2015

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) berbunyi: “*anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Dalam pasal ini secara eksplisit disebutkan ada dua faktor penentu bagi tercapainya kemakmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan yang baik, yaitu terbuka atau transparan dan bertanggung jawab atau akuntabel. Hal ini sesuai dengan visi BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Akuntabel dan transparan seperti layaknya pilar yang menopang tata kelola keuangan yang baik sehingga tercipta kemakmuran rakyat. Stewart dalam teorinya *Stewart's Ladder of Accountability* mengemukakan bahwa untuk menjadi akuntabel perlu melewati langkah-langkah dimana langkah yang pertama adalah *probity* dan *legality*. *Probity* diharapkan dapat dipenuhi dari audit laporan keuangan, sedangkan *legality* merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam mengelola keuangan. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah merupakan awal dari proses tercapainya akuntabilitas secara penuh. Dalam era otonomi daerah ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang krusial dalam pertanggungjawaban pejabat publik daerah kepada masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah

daerah (Pemda) merupakan salah satu pertanggungjawaban formal Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa LKPD tersebut wajib diaudit oleh BPK.

Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar antara kemakmuran dan kesejahteraan. Namun jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran mempunyai lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kesejahteraan, karena kemakmuran terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan kesejahteraan dalam beberapa literatur hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi. Beberapa elemen masyarakat masih meragukan apakah ada hubungan yang erat antara opini audit laporan keuangan (LK) dengan kesejahteraan rakyat. Keraguan tersebut bisa diterima, mengingat fakta ada daerah yang mendapat opini WTP namun indikator-indikator kemiskinan, pengangguran, rasio *Gini*-nya masih belum menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Demikian sebaliknya ada daerah yang menunjukkan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang baik namun memperoleh opini non WTP.

Akbar dan Djazuli (2014) menyebutkan sejak terjadinya reformasi, Indonesia mengalami *big bang* dalam desentralisasi dan demokratisasi dari sebelumnya mempunyai sistem pemerintahan yang sangat sentralisasi. Desentralisasi menurut Smith (1985) merupakan pengurangan pemusatan administrasi pada suatu pusat tertentu dan pemberian kekuasaan kepada Pemda, termasuk di dalamnya pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial. Dengan dilaksanakannya desentralisasi, daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan

yang lebih cepat dan bermuara pada peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat daerah otonom diikuti dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesejahteraan ekonomi pada daerah otonom di Indonesia dengan sampel yang digunakan adalah Kabupaten Badung mewakili daerah yang mendapat opini Tidak Wajar (TW), Kabupaten Tabanan mewakili daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Kota Denpasar mewakili daerah yang mendapat opini WTP. Selain itu tulisan ini juga diupayakan memberi deskripsi hubungan antara kesejahteraan rakyat dengan opini audit yang diberikan atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar. Tulisan ini selanjutnya menggunakan terminologi kesejahteraan rakyat karena indikator-indikator yang digunakan dalam analisis adalah indikator ekonomi. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang dikembangkan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional?
2. Bagaimana pemetaan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar dengan Provinsi Bali sebagai titik *origin*?
3. Bagaimana hubungan indikator-indikator dengan opini LKPD yang diperoleh dengan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar?

## METODOLOGI

### Kerangka Teori

**A**kuntabilitas merupakan salah satu pilar pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada kemakmuran rakyat. Beberapa definisi tentang akuntabilitas telah dijadikan literatur dalam banyak tulisan ilmiah.

Menurut Stewart dalam Kluver (1984):

*“Accountability is about giving an account on what, how and why resources are allocated for certain purposes, how authority is exercised and the relationship between the exercised authority and the expected and achieved results”.*

Akuntabilitas seperti layaknya ilmu ekonomi yang mengandung pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa sumber daya di alokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Akuntabilitas juga akan menyangkut hubungan-hubungan antara pemegang otoritas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut *Tokyo Declaration* (1985):

*“Public accountability means the obligations of persons/authorities entrusted with public resources to report on the management of such resources and be answerable for the fiscal, managerial and programme responsibilities that are conferred”.*

Akuntabilitas publik mempunyai lingkup yang sangat luas termasuk di dalamnya pelaporan atas penggunaan sumber daya publik. Dalam akuntabilitas publik perlu melakukan pelaporan kepada pemberi sumber daya.

Menurut Caiden dalam Behn (2001:221):

*“To be accountable is to answer for one’s responsibilities, to report, to explain, to give reason, to respond, to assume obligations, to render a reckoning and to submit to an outside or external judgment”.*

Untuk menjadi akuntabel, organisasi harus melakukan aktivitas pelaporan, memberikan penjelasan, alasan, respon yang juga mempertimbangkan kondisi eksternal.

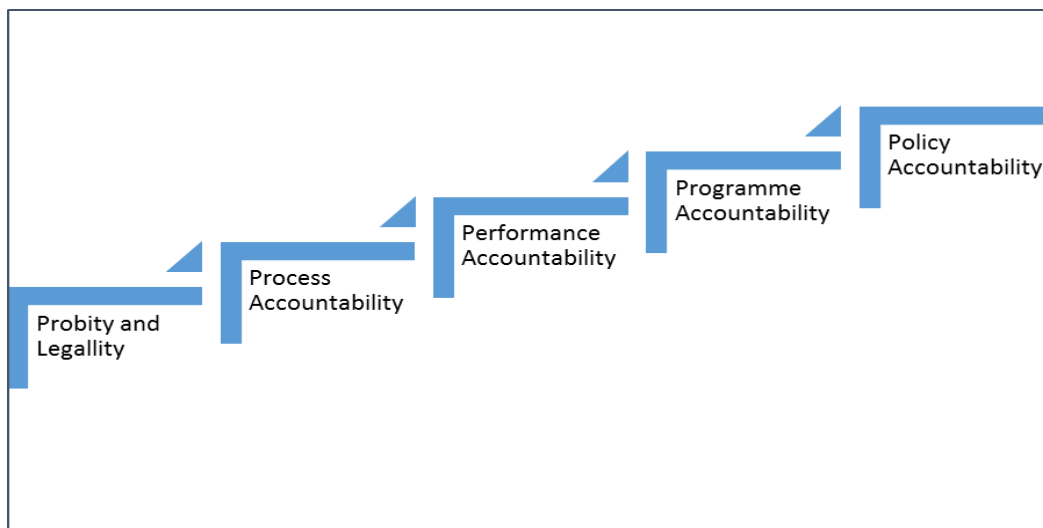
Menurut Kluvers (2003):

*“Accountability in the public sector is different from that of the private sector. It involves complex multifaceted relationships, many roles and tasks with differing risks, uncertainties, and diverse and often conflicting expectations”.*

Akuntabilitas di sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Akuntabilitas di sektor

publik lebih kompleks karena banyak sekali pemangku kepentingan terhadap pemerintahan. Selain itu sektor publik mempunyai peran yang beragam yang diikuti oleh resiko dan ketidakpastian yang bervariasi pula.

Dari keempat definisi akuntabilitas tersebut ada beberapa kata kunci dalam akuntabilitas. Kata kunci yang pertama adalah sumber daya. Dalam organisasi sektor publik, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari alam yang dikerjasamakan dengan swasta untuk mengolahnya atau sumber daya dari masyarakat sebagai pembayar pajak. Jadi ada dua pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah. Kata kunci yang kedua adalah apa, bagaimana dan mengapa sumber daya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan bernegara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, terdiri dari: (1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa,



**Gambar 1.** Stewart’s Ladder Accountability  
 Sumber: Rixon (diolah)

dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kata kunci yang ketiga adalah adanya fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, dimana pelaporan merupakan salah satu bukti formal dilaksanakannya pemakaian sumber daya secara akuntabel dan transparan organisasi atau individu yang diberikan tanggungjawab untuk mengelolanya.

Sedangkan Stewart (1984) dalam Rixon (2008) mengungkapkan lima langkah dalam akuntabilitas. Mekanisme tersebut perlu dilakukan oleh pengelola keuangan publik, dengan gambar 1.

1. Kejujuran/ *probity* dan *legality*, langkah ini bisa dicapai melalui audit LK dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan
2. Akuntabilitas proses/*process accountability*, bisa dilakukan juga dengan audit LK dan reviu terhadap sistem pengendalian internal
3. Akuntabilitas kinerja/*performance accountability*, dapat dipenuhi dengan audit LK dan metode-metode penilaian lain seperti *Balance Score Card* (BSC)
4. Akuntabilitas program/*programme accountability*, dapat dipenuhi perencanaan strategis dari pengelola keuangan dengan dilengkapi dengan LK dan BSC
5. Akuntabilitas kebijakan/*policy accountability*, dapat dilihat dari seberapa besar pertanggungjawaban pengelola secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam regulasi

*Stewart's ladder accountability* sangat sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terdiri dari buku satu LK, buku dua Sistem Pengendalian Internal (SPI)

dan buku tiga kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Akbar (2013), menghubungkan antara pengawasan dengan akuntabilitas publik, menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun ekstern. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana dan target. Sementara itu, tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada tiga jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK menurut UU Nomor 15 Tahun 2006, yang terdiri dari audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Menurut Rai (2008:31):

“Audit atas laporan keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”

“Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi,

efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik”.

Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN (2007):

“Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

“Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa”.

Hasil audit keuangan adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. WDP diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan sehingga auditor memberikan opini WDP adalah adanya penyimpangan prinsip yang material dan pembatasan lingkup pemeriksaan yang berdampak material. TMP diberikan oleh auditor apabila terdapat penyimpangan prinsip akuntansi (salah saji), baik secara individual maupun agregat, yang sangat material. Sedangkan opini TW diberikan apabila terdapat pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai. Selain itu dalam kondisi ekstrim, meskipun bukti pemeriksaan terkait setiap ketidakpastian telah cukup memadai, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.

Hasil akhir dari pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dan kesimpulan atas keekonomian, efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

### **Kemakmuran dan Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi**

UUD 1945 lebih banyak menggunakan terminologi kemakmuran rakyat dalam batang tubuhnya. Selain terdapat pada Pasal 23 ayat (1), kemakmuran rakyat juga digunakan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang secara lengkap berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan keempat bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum.

Kemakmuran dalam sudut pandang ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dalam siklus ekonomi tercapainya tingkat pengangguran yang relatif rendah, pendapatan tinggi yang merata, serta tingginya kemampuan daya beli (jika tingkat inflasi dijaga dalam kondisi yang rendah) (*business dictionary*). Sedangkan kesejahteraan menurut ekonomi merupakan sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan pada alokasi optimal dari sumber daya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Ekonomi kesejahteraan juga menganalisis bagaimana barang-barang dapat didistribusikan sehingga tercapai kondisi saat ini. Hal ini berhubungan dengan studi distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap barang-barang secara umum (*investopedia*). Dari dua definisi tersebut dapat dilihat perbedaannya pada pendekatan yang digunakan. Kemakmuran secara umum menggunakan pendekatan ekonomi makro seperti tingkat pengangguran, pendapatan dan kemampuan daya beli. Sedangkan kesejahteraan pada dasarnya menggunakan

pendekatan analisis ekonomi mikro berupa optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi atau efisiensi yang dianalisis secara agregat. Indikator-indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan, diantaranya:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
3. Tingkat kemiskinan
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Tingkat pengangguran
6. Rasio *Gini*

Perbedaan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Sumner (1996:7) terletak pada lingkupnya. Lingkup kesejahteraan hanya terletak pada kesejahteraan ekonomi seperti kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, dalam lingkup yang lebih luas kemakmuran terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan non ekonomi. Kesejahteraan non ekonomi lebih banyak kepada pemenuhan faktor-faktor non ekonomi seperti kebahagiaan, banyaknya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dapat pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak perlu melakukan lembur untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan mempunyai rasa aman dan nyaman.

Ukuran kesejahteraan non ekonomi sudah sangat bernilai bagi masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh banyaknya waktu berkumpul dengan keluarga merupakan salah satu faktor pendukung utama mengapa indeks kebahagiaan orang Indonesia mempunyai nilai yang hampir sejajar dengan indeks kebahagiaan yang diperoleh oleh orang di Amerika Serikat (AS) meskipun pendapatan

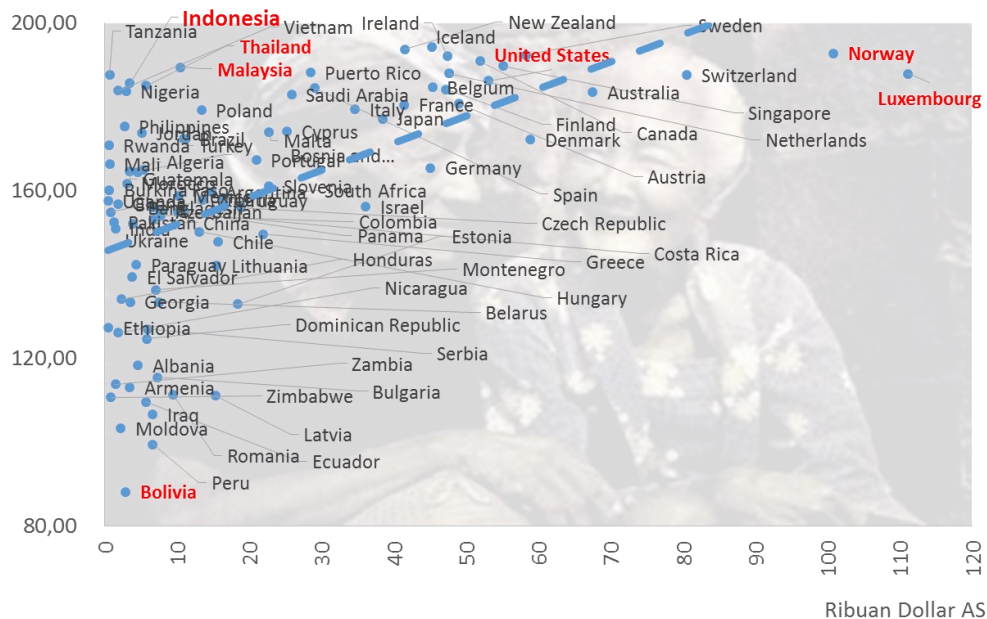
perkapitanya sangat berbeda jauh. Menurut survey yang dilakukan oleh *World Value Survey* (WVS) pada tahun 2012 menunjukkan hubungan yang tidak kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan ternyata tidak berhubungan dengan meningkatnya *Happiness Index* (HI). Orang Indonesia mempunyai HI sebesar 185,7 dengan pendapatan per kapita USD3.475,25 sedangkan orang Amerika mempunyai HI sebesar 186,3 dengan pendapatan perkapita hampir dua puluh kali lipat dari pendapatan per kapita orang Indonesia atau sebesar USD53.142,89. Dari data ini menunjukkan bahwa yang perlu segera diperbaiki bagi Indonesia adalah indikator-indikator kesejahteraan ekonomi. Secara lengkap hubungan HI dengan pendapatan per kapita pada beberapa negara dapat dilihat dalam grafik 1 dan tabel 1.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali dalam angka dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK. Data ditabulasi ke dalam bentuk *excel* untuk dianalisa dan diolah lebih lanjut. Selain itu untuk melengkapi analisis, data primer hasil wawancara dengan *auditee*.

### Metode Analisis Data

Metode komparasi merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara pencapaian ekonomi dan kesejahteraan atau pemerataan ekonomi



**Grafik 1.** Hubungan HI dengan Pendapatan Per Kapita  
 Sumber: WVS



**Tabel 1.** PDB/Kapita dan Indeks Kebahagiaan

Negara	PDB/ Kapita	Indeks Kebahagiaan
Singapore	55.182	189,8
Malaysia	10.514	189,5
Luxembourg	111.162	187,9
United States	53.143	186,3
Indonesia	3.475	185,7
Thailand	5.779	185,1
Bolivia	2.867	88,2

**Sumber:** WVS (diolah)

Kabupaten Badung dan Tabanan dan Kota Denpasar dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Kabupaten lainnya di Bali. Dalam analisis ini akan dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dan Tabanan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan apakah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dan Tabanan berada di bawah atau di atas tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional.

Selain itu metode komparasi juga digunakan untuk membandingkan *scoring* yang didapat dari *scatter plot* dengan opini laporan keuangan pada Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar. Tujuannya adalah untuk membandingkan apakah tingginya perolehan *score* dari proses *scatter plot* akan diikuti dengan pemerolehan opini laporan keuangan yang lebih baik.

Metode *scatter plot* untuk menggambarkan posisi dari masing-masing objek kajian dalam kuadran-kuadran merupakan metode yang juga digunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari penggunaan metode *scatter plot* ini adalah untuk memetakan posisi Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar di antara kabupaten/kota-

kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. *Benchmark* yang digunakan sebagai titik *origin* adalah pencapaian yang diperoleh oleh Provinsi Bali. Dalam metode *scatter plot* akan dipetakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung dan Tabanan dengan ukuran-ukuran kesejahteraan dan pemerataan.

Pada *scatter plot* pertama akan disandingkan pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi diikuti dengan tumbuhnya PDRB per kapita atau untuk menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan penduduk di kedua Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar. Kuadran tujuan dalam *scatter plot* ini adalah pada kuadran pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi pula.

*Scatter plot* yang kedua digunakan untuk menyandingkan pertumbuhan ekonomi dengan *rasio Gini*. Tujuan dari *scatter plot* ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar di antara kecamatan-kecamatan di

bawahnya. Kuadran tujuan dari *scatter plot* ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun rasio *Gini* rendah.

*Scatter plot* yang ketiga digunakan untuk menyandingkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang makin dalam antara yang kaya dengan yang miskin. *Scatter plot* ini juga untuk menggambarkan posisi Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar di antara kabupaten–kabupaten lain di Provinsi Bali.

*Scatter plot* yang keempat digunakan untuk menyandingkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah

pertumbuhan ekonomi menyebabkan terserapnya tenaga kerja di Kabupaten Badung dan Tabanan. *Scatter plot* ini juga untuk menggambarkan posisi Kabupaten Badung dan Tabanan serta Kota Denpasar diantara kabupaten–kabupaten lain di Provinsi Bali. Kuadran tujuan dalam *scatter plot* ini adalah kuadran keempat atau pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran rendah.

*Scatter plot* yang kelima digunakan untuk menyandingkan pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah bertumbuhnya ekonomi diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk dalam akses mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.

**Tabel 2** Kriteria *Scoring* Dalam *Scatter Plott*

Scatter Plot	Komparasi	Kuadran			
		1	2	3	4
1	PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	<b>Tujuan Score 4</b> PDRB per Kapita Tinggi dan LPE Tinggi	<b>Score 2</b> PDRB per Kapita Tinggi dan LPE Rendah	<b>Score 1</b> PDRB per Kapita Rendah dan LPE Rendah	<b>Score 2</b> PDRB per Kapita Rendah dan LPE Tinggi
2	Rasio <i>Gini</i> dan LPE	<b>Score 2</b> Rasio <i>Gini</i> Tinggi dan LPE Tinggi	<b>Tujuan Score 4</b> Rasio <i>Gini</i> Rendah dan LPE Tinggi	<b>Score 2</b> Rasio <i>Gini</i> Rendah dan LPE Rendah	<b>Score 1</b> Rasio <i>Gini</i> Tinggi dan LPE Rendah
3	Tingkat Kemiskinan dan LPE	<b>Score 2</b> Tingkat Kemiskinan Tinggi dan LPE Tinggi	<b>Tujuan Score 4</b> Tingkat Kemiskinan Rendah dan LPE Tinggi	<b>Score 2</b> Tingkat Kemiskinan Rendah dan LPE Rendah	<b>Score 1</b> Tingkat Kemiskinan Tinggi dan LPE Rendah
4	Tingkat Pengangguran dan LPE	<b>Score 2</b> Tingkat Pengangguran Tinggi dan LPE Tinggi	<b>Tujuan Score 4</b> Tingkat Pengangguran Rendah dan LPE Tinggi	<b>Score 2</b> Tingkat Pengangguran Rendah dan LPE Rendah	<b>Score 1</b> Tingkat Pengangguran Tinggi dan LPE Rendah
5	IPM dan LPE	<b>Tujuan Score 4</b> IPM Tinggi dan LPE Tinggi	<b>Score 2</b> IPM Tinggi dan LPE Rendah	<b>Score 1</b> IPM Rendah dan LPE Rendah	<b>Score 2</b> IPM Rendah dan LPE Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan

Metode *scoring* digunakan untuk mengetahui besarnya *score* yang diperoleh dari masing-masing kabupaten/kota di Bali berdasarkan metode *scatter plot*. Nilai tertinggi yang akan diperoleh adalah empat jika kedua indikator menunjukkan nilai yang diinginkan atau berada pada kuadran yang diharapkan. Selanjutnya diberikan nilai 2 jika hanya salah satu indikator yang mencapai kondisi yang diinginkan, namun jika kedua indikator tidak memenuhi kriteria yang diinginkan maka akan diberikan nilai 1. Kriteria penilaian dari masing-masing *scatter plot* dapat dilihat pada Tabel 2.

delapan Kabupaten. Dua entitas yang memperoleh WTP pada tahun 2013 adalah Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Enam entitas mendapatkan WDP terdiri dari Kabupaten Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan. Satu entitas mendapatkan opini TMP Kabupaten Bangli dan satu entitas mendapatkan opini TW Kabupaten Badung. Secara lengkap perolehan opini atas LKPD se Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam grafik 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

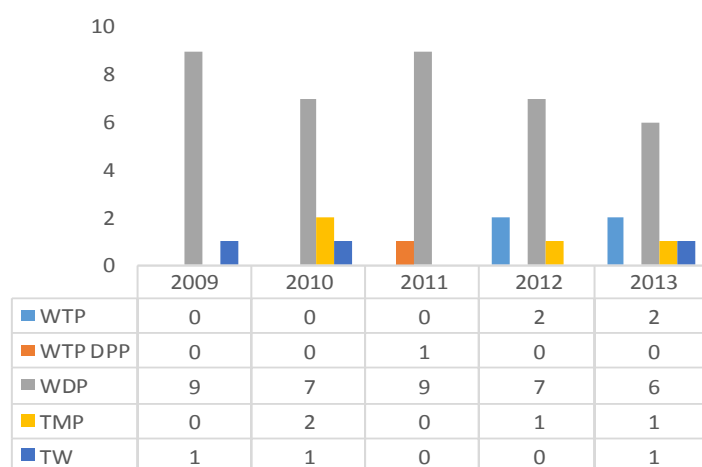
### Opini LKPD Bali

Berdasarkan opini yang diberikan BPK atas LKPD se Provinsi Bali menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013 ada dua entitas yang memperoleh opini WTP dari total sepuluh entitas di Bali yang terdiri dari satu Provinsi, satu Kota dan

### Komparasi Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Indikator kesejahteraan ekonomi se Provinsi Bali tahun 2013 terdiri dari LPE, PDRB/kapita, kemiskinan, pengangguran, rasio *Gini* dan IPM dapat dilihat dalam tabel 3.

LPE Bali tahun 2013 secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata LPE nasional. LPE tertinggi ada di Kabupaten Buleleng sebesar 6,71% sedangkan



**Grafik 2.** Opini LKPD Provinsi Bali

Sumber: IHPS BPK (diolah)

Kabupaten Badung dan Tabanan sebesar 6,41% dan 6,03%. LPE Kota Denpasar juga termasuk tinggi sebesar 6,54%. Tingginya tingkat LPE Bali secara umum masih didominasi oleh sektor jasa pariwisata.

PDRB per kapita Bali tahun 2013 secara umum masih di bawah PDB per kapita nasional sebesar Rp36,5juta. PDRB per kapita tertinggi di Bali ada di Kabupaten Badung sebesar Rp32,85juta sedangkan Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar masing-masing sebesar Rp14,12juta dan Rp18,63juta. Tinggi PDB per kapita nasional lebih banyak disebabkan oleh dominasi dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memang PDRB-nya jauh di atas provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 7,25% di tahun 2013. Tingkat kemiskinan terendah ada di Kota Denpasar sebesar 2,07% diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 2,46% sedangkan Kabupaten Tabanan masih terhitung tinggi mencapai 5,21%. Hal menunjukkan bahwa masyarakat Bali lebih banyak hidup di atas garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di Bali juga secara umum lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional yang mencapai angka 6,25% tahun 2013. Tingkat pengangguran terendah ada di Kabupaten Bangli yang hanya mencapai 0,75% sedangkan Kabupaten Badung dan Tabanan masing-masing sebesar 0,77% dan 0,79% serta Kota Denpasar sebesar 2,64%. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali bila dibandingkan dengan besarnya angkatan kerja.

Rasio *Gini* di Bali menunjukkan data yang lebih rendah dari rasio *Gini* nasional yang mencapai 0,42 pada tahun 2013. Rasio *Gini* terendah ada di Kabupaten Bangli yang hanya mencapai 0,31 sedangkan Kabupaten Badung dan Tabanan mencapai 0,35 dan 0,39. Untuk Kota Denpasar rasio *Gini*-nya mencapai 0,36. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Bali lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan nasional secara agregat.

Indikator yang terakhir adalah IPM, tingkat IPM di Bali secara umum lebih tinggi dari IPM nasional yang mencapai 73,81. Tingkat IPM tertinggi terdapat di Kota Denpasar yang mencapai 79,41. IPM Kabupaten Badung dan Tabanan masing-masing ada pada nilai 76,37 dan 76,19. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dan kesehatan di Bali mudah untuk didapatkan oleh masyarakat.

### ***Scatter Plot***

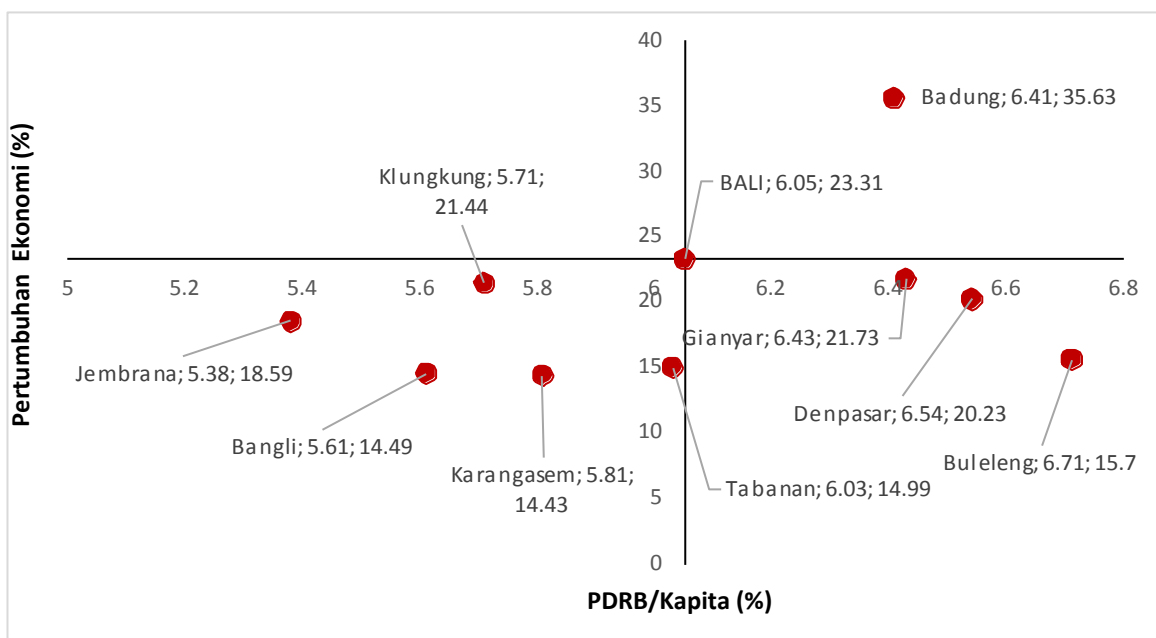
*Scatter plot* pertama yang mempertemukan LPE dengan PDRB per kapita dapat dilihat dalam grafik 3.

Dari *scatter plot* satu terlihat bahwa posisi Kabupaten Badung berada pada kuadran satu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Badung berada diatas Provinsi Bali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 6,05% sedangkan Kabupaten Badung mencapai 6,41%. Kota Denpasar mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,54% lebih tinggi dari Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung. Sedangkan Kabupaten Tabanan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03% lebih rendah dari Provinsi Bali, Kota

**Tabel 3** Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bali Tahun 2013

	LPE	PDRB/Kapita	Kemiskinan	Pengangguran	Rasio Gini	IPM
	(%)	(Juta Rp)	(%)	(%)		
Jembrana	5,38	16,38	5,56	3,39	0,37	74,29
Tabanan	6,03	14,12	5,21	0,79	0,39	76,19
Badung	6,41	32,85	2,46	0,77	0,35	76,37
Gianyar	6,43	18,71	4,27	2,16	0,33	75,02
Klungkung	5,71	19,12	7,01	2,12	0,36	72,25
Bangli	5,61	12,96	5,45	0,75	0,31	72,28
Karangasem	5,81	12,77	6,88	1,34	0,33	68,47
Buleleng	6,71	14,22	6,31	2,13	0,38	72,54
Denpasar	6,54	18,63	2,07	2,64	0,36	79,41
BALI	6,65	20,74	4,49	1,79	0,40	74,11
<b>NASIONAL</b>	<b>5,78</b>	<b>36,50</b>	<b>7,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,42</b>	<b>73,81</b>

Sumber: BPS (Diolah)



**Grafik 3.** Scatter Plot LPE dan PDRB per Kapita

Sumber: Hasil Pengolahan

Denpasar maupun Kabupaten Badung.

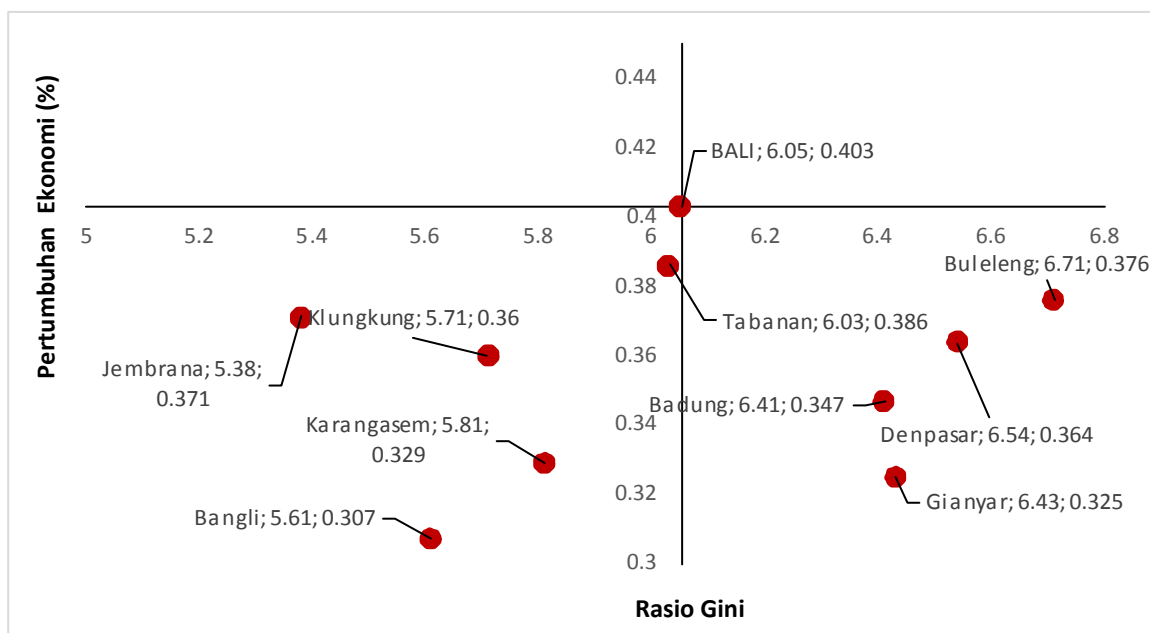
Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Buleleng. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Denpasar tidak diikuti oleh pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi juga. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi berada di Kabupaten Badung sebesar 35,63% sedangkan Kota Denpasar sebesar 20,23%. Sedangkan pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Bali sebesar 23,31% masih lebih tinggi dari Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan yang mencapai 14,99%.

Scoring dari scatter plot pertama, Kabupaten Badung mendapatkan score empat. Pada kuadran dua dan empat yang mendapatkan score dua adalah Kabupaten Gianyar, Buleleng dan Kota Denpasar. Sedangkan yang berada di kuadran tiga Kabupaten Klungkung, Jembrana, Bangli, Karang Asem dan Tabanan mendapatkan score satu.

Scatter plot kedua yang mempertemukan LPE dan rasio Gini dapat dilihat dalam grafik 4.

Dalam scatter plot dua, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali rasio Gini-nya lebih rendah dibandingkan dengan rasio Gini Provinsi Bali yang mencapai 0,403. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten lebih baik dibandingkan Provinsi Bali secara keseluruhan. Kuadran tujuan adalah kuadran kedua yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangan pendapatan rendah. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berada dalam kuadran kedua ini dengan rasio Gini masing-masing 0,347 dan 0,347. Sedangkan Kabupaten Tabanan berada di kuadran ketiga dengan rasio Gini sebesar 0,386. Rasio Gini terendah di Provinsi Bali ada di Kabupaten Bangli dengan koefisien sebesar 0,307.

Dari scatter plot kedua yang mendapatkan



Grafik 4. Scatter plot kedua LPE dan Rasio Gini  
 Sumber: Hasil Pengolahan

score empat atau berada di kuadran dua adalah Kabupaten Buleleng, Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. Sedangkan Kabupaten Klungkung, Jembrana, Karangasem, Bangli dan Tabanan mendapatkan score 2 karena berada di kuadran tiga.

*Scatter plot* ketiga, mempertemukan LPE dengan tingkat kemiskinan dapat dilihat dalam grafik 5.

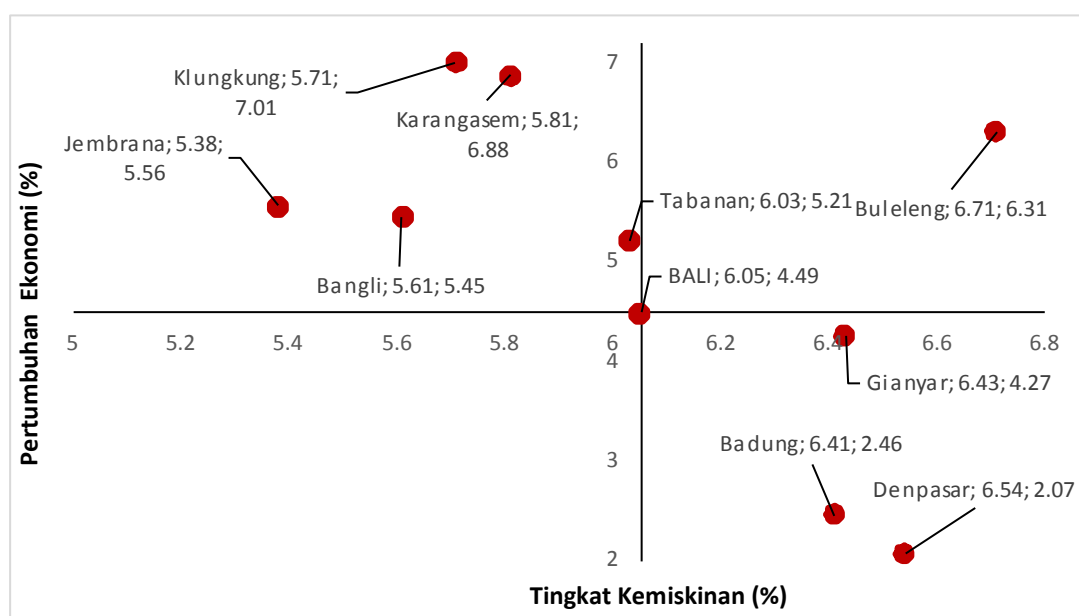
Berdasarkan grafik 5, Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar mendapatkan score empat karena berada di kuadran kedua. Kabupaten Buleleng mendapatkan score dua sedangkan Kabupaten Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan dan Bangli mendapatkan score satu karena berada di kuadran empat.

*Scatter Plot* keempat mempertemukan LPE dengan tingkat pengangguran dapat dilihat dalam grafik 6.

Berdasarkan grafik 6, Kabupaten Badung memperoleh score empat karena berada di kuadran kedua. Kabupaten Gianyar, Buleleng, Karangasem, Bangli, Tabanan dan Kota Denpasar berada di kuadran pertama dan ketiga mendapatkan score dua, sedangkan Kabupaten Jembrana dan Klungkung mendapatkan score satu karena berada di kuadran keempat.

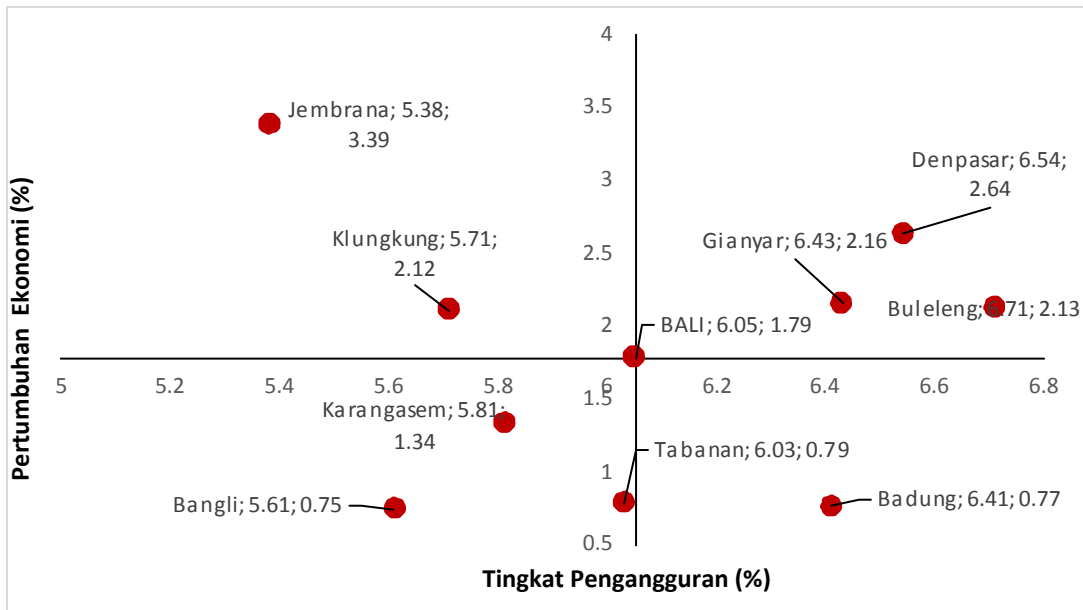
*Scatter plot* kelima mempertemukan LPE dengan IPM yang secara rinci dapat dilihat dalam grafik 7.

Berdasarkan grafik 7, Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar mendapatkan score empat karena berada di kuadran satu sedangkan Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Tabanan mendapatkan score dua karena berada di kuadran dua dan empat. Namun Kabupaten Bangli, Karangasem dan Klungkung berada di kuadran ketiga sehingga mendapatkan score satu.

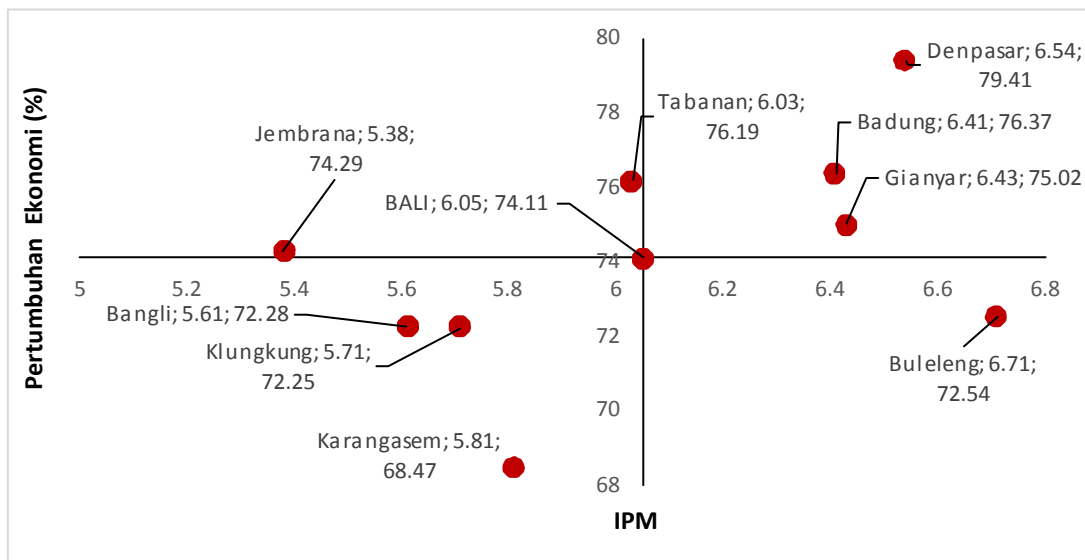


**Grafik 5.** *Scatter plot* ketiga LPE dan Tingkat Kemiskinan

Sumber: Hasil Pengolahan



**Grafik 6.** Scatter plot keempat LPE dan Tingkat Pengangguran  
 Sumber: Hasil Pengolahan



**Grafik 7.** Scatter Plot Kelima LPE dan IPM  
 Sumber: Hasil Pengolahan



## Hasil Akhir

Hasil akhir kajian berupa ikhtisar dari *score* yang diperoleh oleh Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar berdasarkan *scatter plot* pertama sampai kelima. Selain itu, hasil akhir analisis juga menghubungkan *score* akhir yang didapat dengan opini LKPD yang diperoleh oleh kabupaten/kota di Bali pada tahun 2013. Hasil akhir kajian dapat dilihat dalam tabel 4.

Berdasarkan tabel 4, Kabupaten Badung berhasil mendapatkan *score* maksimal sebesar 20 karena Kabupaten Badung berada di kuadran tujuan pada setiap *scatter plot*. Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar mendapatkan nilai 16 karena dalam *scatter plot* pertama dan keempat tidak berada di kuadran tujuan. Kabupaten–kabupaten lainnya mendapatkan *score* yang lebih kecil dari 16.

Asumsi yang dibangun dalam kajian ini adalah indikator–indikator kesejahteraan ekonomi bisa berhubungan dengan opini LKPD yang diperoleh. Sebagai contoh Kabupaten Badung yang mendapatkan *score* maksimal atau secara data dapat kita katakan bahwa Kabupaten Badung berhasil mencapai indikator–indikator kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Bali namun Kabupaten Badung memperoleh opini TW yang tidak lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Tabanan yang memperoleh *score* 8 dalam indikator kesejahteraan ekonominya dan mendapatkan opini WDP. Untuk Kota Denpasar yang mendapatkan *score* yang cukup tinggi sebesar 16 sejalan dengan opini WTP yang diperolehnya. Demikian halnya dengan Kabupaten Bangli yang mendapatkan opini TMP yang juga sejalan dengan perolehan *score* tujuh yang tidak terlalu tinggi dalam indikator kesejahteraan ekonominya. Di sisi lain Kabupaten Jembrana dan Karangasem yang *score* kesejahteraan ekonominya tidak begitu baik namun mendapatkan opini WDP

**Tabel 4.** Hasil Akhir

Kabupaten/ Kota	Opini	Score dari Scatter Plot					
		Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	Total
Jembrana	WDP	1	2	1	1	2	7
Tabanan	WDP	1	2	1	2	2	8
Badung	TW	4	4	4	4	4	20
Gianyar	WDP	2	4	4	2	4	16
Klungkung	WDP	1	2	1	1	1	6
Bangli	WDP	1	2	1	2	1	7
Karangasem	WDP	1	2	1	2	1	7
Buleleng	WDP	2	4	2	2	2	12
Denpasar	WTP	2	4	4	2	4	16

Sumber: Hasil Pengolahan

atas LKPD-nya. Sama halnya dengan Kabupaten Klungkung juga mendapatkan opini WDP meski *score* yang didapat enam.

Dari data di atas secara empiris dapat dibuktikan bahwa belum ada keterkaitan yang kuat antara audit atas laporan keuangan atau LKPD dengan kesejahteraan rakyat. Audit atas laporan keuangan membandingkan antara praktek akuntansi dan keuangan di Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memang dibuat belum sepenuhnya mempertimbangkan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan dalam kajian. Pertama, secara umum indikator-indikator kesejahteraan ekonomi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar lebih baik dibandingkan dengan Bali dan Nasional. Kedua berdasarkan *scatter plot* yang dilakukan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mendapatkan *score* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *score* yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Bali. Ketiga secara empiris dibuktikan bahwa untuk data Bali tahun 2013 belum terlihat hubungan yang kuat antara audit keuangan dengan indikator kesejahteraan ekonomi.

## SARAN

Indikator-indikator kesejahteraan ekonomi pada dasarnya merupakan *output* ataupun *outcome* yang dihasilkan atas digunakannya sumber daya ekonomi Pemda terutama sumber daya keuangan Pemda untuk

program-program atau aktivitas-aktivitas yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep *value for money*, input yang digunakan harus bisa menghasilkan *output* yang diinginkan serta memberikan *outcome* yang lebih baik bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas yang juga merupakan pengukuran pada audit kinerja. Untuk perkembangan ilmu auditing perlu dipilah dan dipilih metodologi yang cocok dalam rangka mengukur indikator kesejahteraan. Ke depan perlu dikembangkan audit kinerja dengan mengukur dan menguji efektivitas *output* dan *outcome* yang disinyalir mempunyai hubungan yang lebih erat dengan pengelolaan keuangan. Sehingga audit kinerja diharapkan menjadi jembatan antara audit dan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2013). *Sistem Pengawasan Keuangan Negara Di Indonesia*, CV. Bumi Metro Raya.
- Akbar, B., & Djazuli, A. (2014). *Comparison Study on Regional Development Bank Efficiency in the Period of Before and After Fiscal Decentralization Policy*, dipresentasikan dalam IFABS International Seminar, Lisbon Portugal., 6 – 7 Juni 2014.
- Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI). (1985). *Tokyo declaration of guidelines on public accountability*, 3rd Assembly, 2nd International Seminar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Produk Domestik Regional Bruto. Diakses dari <http://www.bps.go.id/Subjek/view/>

- id/52#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek2
- Behn, R. B. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*, The Brooking Institution.
- Businessdictionary. Diakses dari <http://www.businessdictionary.com/definition/prosperity.html>.
- Champernowne, D. G., & Cowell, F. A. (1998). *Economic Inequality and Income Distribution*, Cambridge University Press.
- Investopedia. Welfare Economics. Diakses dari [http://www.investopedia.com/terms/w/welfare\\_economics.asp](http://www.investopedia.com/terms/w/welfare_economics.asp).
- Kluvers, R. (2003). Accountability for Performance in Local Government, *Australian Journal of Public Administration*. 62(1), 57-69.
- Kluvers, R., & Tippett, J. (2010). Mechanisms of Accountability in Local Government: An Exploratory Study, *International of Business and Management*, 5(7).
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007*
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik Konsep Praktek Studi Kasus*, Penerbit Salemba Empat.
- Rixon, D., & Ellwood, S. (2008), Reporting for Public Sector Agencies: A Stakeholder Model.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, terjemahan *Desentralisasi Dimensi Teritorial Suatu Negara*, MIPI.
- Sumner, L. W. (1996). *Welfare, Happiness and Ethics*, Clarendon Press Oxford.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- World Value Survey. Diakses dari <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.